Lembaran Antropologi

Article

Vol. 3, No. 2 (2024)
Page 147-164
https://doi.org/10.22146/la.17675

"Kuku Berkarat": Ketimpangan Nasib Petani Tambak di Kawasan Delta Mahakam

Ratnasiwi Triari Ambarwati
Peneliti Junior Sebijak Institute Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
Email: ria.ratnaambarwati@gmail.com

Abstract

This study investigates the causes of inequality in pond land tenure, despite easy land claims, relatively low land prices, and the absence of expensive shrimp feed. Arguments are presented through ethnographic study data over two periods (July - August and November - December 2023) with an effective deepening of 34 days. The findings show that the disparity of fate is formed by the construction of unequal distribution of prosperity by the power control of large farmers. Control of power is formed from the dependence between capital and labor which disparity of fate is formed by is used for profit accumulation. The dependency relationship is built on the limited capital and means of production of small and medium farmers, which makes them only dependent on large farmers. The dependency is utilized for profit accumulation through the loan mechanism as a latent bond, sales manipulation, and monopolization of crops. In addition, they have sources of capital turnover from export companies or banks, project implementers, political exchanges, and leasing company mess (Pertamina Hulu Mahakam). Meanwhile, the crush of simple reproduction due to ecological risks and fluctuations in shrimp prices shows that the fate of small and medium farmers is more likely to experience stagnation or losses. Therefore, they choose to sell their ponds, switch or look for side jobs outside the pond sector such as 'rengge' fishermen, 'papai' shrimpers, and 'tudai' to make a living that is only a subsistence alternative –not a way out to accumulate wealth like large farmers.

Keywords: *political economy, pond, social disparity, accumulation*

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki penyebab ketimpangan penguasaan lahan tambak, meskipun pengklaiman lahan dilakukan dengan mudah, harga lahan relatif murah, dan tanpa adanya penggunaan pakan udang yang mahal. Argumentasi dihadirkan melalui data studi etnografi selama dua periode (Juli–Agustus dan November—Desember 2023) dengan pendalaman efektif selama 34 hari. Penelitian ini melihat tambak sebagai kegiatan produksi dengan fokus analisis meminjam konsep politik ekonomi perubahan agraria oleh Henry Bernstein.Temuan penelitian menunjukkan bahwa format disparitas nasib terbentuk atas konstruksi ketidakmerataan distribusi kemakmuran oleh kontrol kuasa petani besar. Kontrol kuasa terbentuk dari ketergantungan antara modal dan tenaga kerja yang dimanfaatkan untuk akumulasi

keuntungan. Relasi ketergantungan terbangun atas keterbatasan modal dan alat-alat produksi para petani kecil dan menengah yang menjadikan mereka hanya bergantung kepada petani besar. Ketergantungan tersebut dimanfaatkan untuk akumulasi keuntungan melalui mekanisme pinjaman sebagai ikatan laten, manipulasi penjualan, dan monopoli hasil panen. Selain itu, mereka memiliki sumber perputaran modal dari perusahaan ekspor atau bank, pelaksana proyek, bursa politik, dan penyewaan mes perusahaan (Pertamina Hulu Mahakam). Sementara itu, impitan reproduksi sederhana akibat risiko ekologis dan fluktuasi harga udang memperlihatkan bahwa nasib petani kecil dan menengah lebih berpotensi mengalami stagnasi atau kerugian. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menjual tambak, beralih atau mencari sampingan pekerjaan di sektor luar tambak seperti nelayan 'rengge', udang 'papai', dan 'tudai' demi menyambung hidupnya yang hanya sebagai alternatif subsisten –tidak menjadi jalan keluar untuk melakukan akumulasi kekayaan seperti petani besar.

Kata Kunci: *politik ekonomi, tambak, ketimpangan sosial, akumulasi*

Pendahuluan

> "... kalau dulu memang orang bilang kerja tambak itu 'berkarat kukunya[1] , tebal dompetnya'... tapi sekarang 'tetap berkarat kukunya, tipis dompetnya'," ucap Pak Ucok.

Pernyataan di atas sebagai salah satu potret dinamika kegiatan produksi tambak di kawasan Delta Mahakam yang terbingkai atas perubahan alih fungsi lahan dan dikemudikan oleh para migran Bugis. Pada mulanya, mereka memilih menetap karena melihat banyaknya potensi perikanan dan perkebunan yang dapat dimanfaatkan sekaligus dijadikan tumpuan ekonomi. Lambat laun, roda ekonomi yang awalnya bertumpu pada perkebunan kelapa dan penangkapan udang laut lepas beralih menjadi budidaya tambak udang (Powell dan Osbeck 2010). Kegiatan budidaya tambak dimulai pada tahun 1980-an oleh sejumlah penduduk setempat yang disponsori oleh beberapa perusahaan penyedia fasilitas pendingin (*cold storage*) (Persoon dan Simarmata 2014). Udang juga merupakan enam komoditas boom crop yang mampu memberikan lonjakan produksi dan konversi luasan lahan yang besar dalam waktu yang relatif cepat besar (Hall 2011; de Koninck 2003; Tan 2000; Trung 2003, dalam Santoso 2019). Akibatnya, konversi lahan mangrove menjadi tambak meningkat dan mengubah lanskap wilayah Delta Mahakam (Bosma dkk. 2012).

Konversi hutan mangrove menjadi tambak bukanlah tanpa persoalan, tetapi memunculkan ketimpangan penguasaan lahan. Pada awal kedatangan migran Bugis, wilayah Delta Mahakam merupakan wilayah yang dianggap sebagai lahan tidur dan yang

1 *Kuku berkarat* merupakan interpretasi masyarakat sebagai indikasi seseorang yang sering mengelola tambak. Hal tersebut merujuk pada warna kuku yang akan berubah menjadi oranye kecoklatan seperti besi berkarat akibat dari reaksi ilmiah dengan kandungan air maupun zat-zat yang ada di tambak.

dapat dengan mudah diklaim secara bebas oleh siapa saja tanpa adanya legalitas hukum (Persoon dan Simarmata 2014). Hal tersebut memudahkan penguasaan lahan dan yang membuat para imigran Bugis berjaya hingga tahun 1990-an. Namun, seiring berjalannya waktu muncul tren penurunan produksi udang. Hal ini diakibatkan oleh kemunculan penyakit udang dan fluktuasi harga yang kemudian turut berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi mereka. Pada akhirnya, hanya segelintir orang yang mampu menguasai hingga puluhan hektar. Imigran Bugis lainnya yang telah lama menetap dan mengelola tambak hanya bisa stagnan atau bahkan mengalami kerugian. Sementara itu, harga lahan relatif murah jika dibandingkan wilayah lain sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan. Hal tersebut diibaratkan dengan, "jual satu petak di sana (Makassar), bisa beli empat petak di sini dengan ukuran per petaknya sama, yaitu lima ha." Belum lagi, penerapan sistem tambak ekstensif atau tradisional yang berbiaya produksi rendah dengan tidak menggunakan pakan udang (Bunting dkk. 2013). Komponen biaya operasional paling tinggi untuk produksi tambak di Sulawesi Selatan yaitu 50% dari total produksi (Mustafa dkk. 2023).

Ketimpangan penguasaan lahan tambak di Delta Mahakam memiliki kemiripan dengan dinamika yang terjadi di wilayah lain di Asia Tenggara. Beberapa kajian masalah tersebut telah banyak disorot melalui pendekatan politik ekologi dan politik ekonomi. Luo dkk. (2022) misalnya mencatat kemunculan tambak udang di Thailand tidak terlepas dari aturan atau kebijakan yang dicanangkan pemerintah, "the Shrimp Aquaculture Export Promotion Program and Land and Fisheries Law in 1987". Kebijakan ini telah mendorong transformasi penggunaan lahan dan izin kepemilikan pribadi atas bahan produksi. Kajian lain yang dilakukan oleh Hall (2011) juga turut mencatat udang sebagai salah satu komoditas yang memunculkan tumpang tindih penguasaan lahan di Asia Tenggara. Hal ini karena penguasaan elite dari luar yang merebut tanah diatas klaim "lahan tidur." Dari kacamata politik ekonomi, studi yang dilakukan oleh Semedi (2013) menunjukkan bahwa pengklaiman lahan di kawasan pesisir di wilayah Comal untuk tambak dapat secara bebas dan mudah. Namun demikian, persoalannya adalah pemertahanan produktivitas yang ternyata jauh lebih sulit. Para warga lokal sering kali kalah saing dengan pendatang dari Brebes yang memiliki dukungan dana lebih memadai dibanding mereka. Pada akhirnya, mereka kehilangan lahan atau bekerja sebagai buruh tani. Dalam konteks Delta Mahakam, studi Lenggono dkk. (2012) mengenai pergerakan kapitalisme pertambakan menunjukkan bahwa kapitalisme pertambakan muncul karena kemampuan para *ponggawa* yang mampu memanfaatkan momentum, pascapelarangan *trawl* 1983. Mereka melakukan "eksploitasi" dengan membentuk struktur pasar yang monopolistis atau monopsonistis.

Dari paparan studi literatur di atas, penguasaan lahan tambak terjadi karena pertama, adanya kebijakan yang mendorong aktor untuk mengakses lahan. Kedua, adanya aktor dari luar yang melihat peluang untuk menguasai lahan. Ketiga, kemunculan kapitalisme pertambakan yang mendorong beberapa aktor untuk bergerak memanfaatkan momentum. Merujuk pada studi literatur tersebut, belum ada yang mengeksplorasi mengenai hubungan ketimpangan penguasaan lahan dan relasi para aktor dalam kegiatan produksi tambak. Analisis dilakukan dengan meminjam kerangka berpikir politik ekonomi dalam perubahan agraria oleh Henry Bernstein. Penelitian ini melihat tambak sebagai upaya kegiatan produksi melalui proses tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah alam guna memenuhi kebutuhan manusia (Bernstein 2019). Kegiatan tersebut

terbangun melalui faktor-faktor produksi meliputi tanah, modal, teknologi, dan tenaga kerja. Kekuatan produktif yang merujuk pada relasi sosial, di mana modal tenaga kerja dimanfaatkan untuk mencapai keuntungan dan akumulasi kekayaan, sedangkan tenaga kerja harus bekerja untuk modal guna mendapatkan sarana subsistennya (kebutuhan dasar hidup). Kemudian, peneliti akan membedah relasi antar-aktor melalui empat pertanyaan kunci yaitu, pertama, *siapa* memiliki *apa* yang merujuk pada kepemilikan atas rezim properti. Kedua, *siapa* melakukan *apa* yang merujuk pada pembagian kerja secara sosial dalam mata rantai kegiatan produksi. Ketiga, *siapa* mendapatkan *apa* yang mengacu pada pembagian "hasil kerja" secara sosial. Keempat, hasil yang diperoleh untuk *apa* (ibid).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif berupa etnografi di Desa Dere', Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara. Pertama, peneliti melakukan observasi-partisipatif untuk memahami secara langsung praktik kegiatan produksi tambak. Peneliti melakukan observasi-partisipan dengan tinggal di salah satu rumah warga dan mengikuti kegiatan sehari-hari masyarakat lokal. Kegiatan sehari-hari tersebut seperti memanen udang, mengecek tambak, meracun, menyortir hasil panen, dan yang lainnya. Kunjungan ke lokasi penelitian dilakukan sebanyak dua kali. Pertama, observasi dan identifikasi awal dilakukan ketika KKN (Juli-Agustus 2023). Kedua, selama 34 hari yaitu 6 November-10 Desember 2023 untuk pengambilan data secara mendalam.

Sementara itu, metode wawancara mendalam semi terstruktur diaplikasikan untuk mendapatakan data secara mendalam terkait relasi sosial pada kegiatan produksi tambak. Partisipan dalam wawancara mendalam dipilih menggunakan teknik *snowball* dengan mengidentifikasi *social mapping* para informan. Keterbatasan akan pengetahuan bahasa Bugis maupun Makassar menjadikan peneliti memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat memahami maksud dari informan. Selain itu, keterbatasan akses transportasi karena letak rumah informan yang terpisah oleh sungai menjadikan peneliti harus mampu menyiasatinya dengan mencari tumpangan kapal. Keterbatasan sinyal internet menjadikan peneliti sulit untuk menjangkau informan dan membuat janji temu. Peneliti sering kembali ke rumah informan sampai tiga kali karena kunjungan pertama hingga kedua tidak bertemu dengan informan yang dituju.

Bagi peneliti, pengambilan data menjadi pengalaman yang menantang sekaligus menyenangkan. Membangun relasi hingga mendapatkan kepercayaan dan keterbukaan informasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Pertanyaan "*untuk apa Mbak belajar tentang tambak?*," sering peneliti dapati. Bahkan, pernyataan "*.. saya dikasih tahu oleh teman kalau ada mahasiswa atau dinas apapun itu tanya mengenai pendapatan, jangan bilang banyak-banyak, soalnya nanti ada hubungannya sama pajak...*." Oleh karena itu, penulis menyiasatinya dengan cara membantu panen secara parsial maupun total, mengupas udang, dan sering berkunjung ke rumah informan. Selain itu juga, peneliti melakukan wawancara informal seperti mengobrol santai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana tanpa pegangan kertas sehingga membuat informan tidak merasa terintimidasi.

Desa Dere : Potret Resiliensi Migran Bugis dan Perkembangan Produksi Tambak

Secara geografis, Desa Dere' terletak strategis di kawasan Delta Mahakam, yaitu wilayah yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Secara administratif, desa ini berada di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Permukiman tersebut dikelilingi oleh rimbunan pohon nipah dan mangrove. Deretan rumah panggung khas tengah laut berbalut kayu ulin dan mangrove menjadi tempat berlindung diri dari dingin maupun panasnya cuaca. Desa ini terdiri dari tiga dusun dengan total 20 RT yang keberadaannya tersebar antarpulau. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani tambak dengan 509 orang dari total penduduk yaitu 2.550 menggeluti bidang tersebut (KKN 45 UNMUL 2020). Masyarakat lokal menyebut tambak dengan istilah *empang*. *Empang* memiliki berbagai macam ukuran, umumnya dalam satu petak berukuran lima ha (500 m x 100 m). *Empang* tersebut biasanya berada di belakang atau depan rumah. Sedangkan, *empang* yang berukuran lebih dari 10 ha biasanya berada di lain pulau atau jauh dari permukiman warga sehingga perlu dijaga oleh penjaga *empang* dan hanya bisa dijangkau menggunakan perahu ketinting.

Sejak 1940, Desa Dere' didatangi oleh para migran Bugis yang bertumpu pada sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sebelum kedatangan mereka, wilayah tersebut merupakan lahan kosong tidak berpenghuni dan kurang dimanfaatkan (Persoon dan Simarmata 2014). Wilayah tersebut memiliki lahan luas yang bisa digarap menjadi area pertanian atau perkebunan kelapa (Lenggono 2015). Budidaya kelapa menjadi basis ekonomi utama awal masyarakat Dere' yang dijual ke Samarinda menggunakan perahu dengan jarak tempuh hingga satu minggu. Kemampuan dan keterampilan bertahan hidup di tengah laut turut menjadikan sektor perikanan sebagai sumber pangan mereka sehari-hari. Hutan nipah dan bakau menjadi habitat berbagai spesies udang maupun ikan seperti kerapu, kakap, dan bandeng (Persoon dan Simarmata 2014). Tidak jarang, mereka menyandang status pekerjaan ganda sebagai nelayan dan petani.

Basis ekonomi yang bertumpu pada perkebunan dan perikanan laut lepas beralih menjadi tambak. Sendi ekonomi berbasis perkebunan kelapa berjalan hingga tahun 1987 bertepatan dengan datangnya gelombang migrasi kedua. Pada tahun tersebut, pintu air yang menahan gelombang air laut mengalami kebocoran sehingga mengakibatkan jebol. Hal tersebut menyebabkan air asin masuk ke wilayah perkebunan dan mematikan pohon-pohon kelapa. Secercah harapan muncul ketika orang Makassar yang mencoba membangun tambak di wilayah ini.

> "....dulunya sini kebun karena air payau.... pemula kakak saya disini (RT 15) namanya H. Sakman...pertama dibuka di sini tambak, penghuni pertama orang Bugis setelah abrasi terjadi mereka mau pergi dengan lahannya dibeli oleh orang Makassar dengan harga yang murah karena tidak bisa diapa-apakan...250ribu/alih fungsi kali ya...baru dilihatnya tambak itu menjanjikan, mereka (orang Bugis) belajar..." (Wawancara Pak Royan, 23 Juli 2023).

Sementara itu, produksi udang tiger laut lepas mengalami penurunan karena larangan penggunaan pukat harimau yang didasarkan PP No.39/1980 lokal (Sidik 2010; Bourgeois dkk 2002). Peluang kesuksesan tambak udang semakin tinggi berkat adanya dukungan

cold storage dari perusahaan ekspor Cina. Ditambah, krisis finansial yang terjadi di Asia Tenggara pada akhir tahun 1990an membuat ekspor udang dalam dolar dari Indonesia semakin menguntungkan karena besarnya inflasi mata uang (Persoon dan Simarmata 2014). Oleh karena itu, nelayan udang juga beralih menjadi petani tambak sehingga meningkatkan angka konversi lahan mangrove menjadi tambak.

Konversi lahan mangrove menjadi tambak semakin masif dilakukan hingga mengabaikan status kawasan yang berlaku. Berdasarkan SK Menhut No. SK. 718/Menhut-II/2014 Kawasan Delta Mahakam berstatus Hutan Produksi Tetap dengan total luas ±101.020,04 hektare. Pemanfaatan hutan mangrove Delta Mahakam harus melalui hak pengusahaan atau pemungutan hasil hutan yang dimohonkan kepada Menteri Kehutanan secara perorangan dengan menggunakan badan hukum atau koperasi (Lenggono 2015). Namun, aturan tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat dan kurang diawasi pula oleh polisi hutan. Akibatnya, siapa saja yang memiliki modal dapat mengkonversi lahan mangrove menjadi tambak secara ilegal.

Seiring berjalannya waktu, produksi tambak di Desa Dere' menghadapi gelombang pasang surut. Masa kejayaan udang terjadi di tahun 1996 hingga 1999. Pada saat itu bibit sering masuk dengan sendirinya ke *empang*. Terlebih, tahun 1997 hingga 1999 harga udang untuk *size*[2] 20 mencapai harga Rp250.000/kg sehingga rata-rata petani tambak yang punya empat ha mampu memberangkatkan haji anggota keluarganya lebih dari dua orang. Tren penurunan hasil tambak terjadi sejak akhir tahun 1998 sampai 2000. Penyebabnya tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi muncul anggapan bahwa menurunnya hasil tambak dipengaruhi oleh keberadaan perusahaan minyak dan gas bernama TOTAL. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1990-an hingga 2017 dan digantikan oleh Pertamina Hulu Mahakam yang berada pada *site* NPU (North Processing Unit).

Selain kehadiran perusahaan, dinamika pasang surut produksi tambak juga disinyalir oleh kerentanan perkembangan bibit udang. Masa rawan bibit udang terkena penyakit adalah satu bulan setengah setelah memasukkan ke tambak. Ciri utamanya adalah kepiting akan mati lebih dulu sehingga belum sampai dua bulan bibit udang tersebut juga mati. Lebih tepatnya, kematian udang mulai terjadi pada *konda*[3] ke tiga hingga empat. Puncak kematian udang ketika selesai *nyorong*[4] besar yaitu puncak ke 8, 9, 11, dan 123 . Kerugian dapat diantisipasi dengan mengambil udang yang kemerahan. Namun, jika udang tersebut tidak segera dipanen lebih dari tiga hari, hasil panennya hanya mencapai maksimal dua kilogram. Masyarakat kurang bisa menyesuaikan perubahan kualitas tambak dan masih menggunakan cara-cara konvensional. Akibatnya, kualitas tambak akan terus menurun seiring bertambahnya tahun apabila tidak dikontrol dengan teliti.

Struktur Sosial dan Kegiatan Produksi Tambak

Saat ini, petani tambak melakukan modifikasi alat produksi untuk mempertahankan produktivitasnya. Upaya tersebut dipilih sebagai strategi atas kondisi ekologis akibat dampak perubahan iklim seperti munculnya penyakit udang, peningkatan tinggi gelombang air laut, dan cuaca yang sulit diprediksi. Hal tersebut terlihat dari proses pembuatan tanggul

2 *size* adalah istilah yang merujuk pada kelompok ukuran udang

3 *konda* adalah periode gelombang air laut sedang surut selama satu minggu

4 *nyorong* adalah periode gelombang air laut sedang pasang selama satu minggu

yang awalnya menggunakan tenaga manual manusia beralih ke teknologi mesin yaitu ekskavator. Kedua, peralihan dari penggunaan bibit udang alam menjadi bibit udang rawat yang didatangkan dari Balikpapan, Samarinda, dan Surabaya. Ketiga, memasukkan bibit *nener* atau ikan bandeng. Keempat, menambahkan pupuk mutiara, urea, dan kapur untuk meningkatkan pertumbuhan udang. Kelima, menggunakan racun *wavian* dan *saponin* untuk mempercepat proses pembersihan ikan predator. Keenam, menyemprotkan racun *rundut* untuk mencegah tumbuhnya rumput di sekitar tambak. Ketujuh, mengganti pintu air yang berlapis papan kayu menjadi cor semen.

Persoalan lainnya muncul, di mana seiring bertambahnya modifikasi alat yang dilakukan, biaya produksi tambak juga semakin meningkat. Hal tersebut tampak dari total biaya operasional yang diperlukan dalam satu periodenya. Modal awal pembukaan lahan untuk membangun tanggul membutuhkan biaya sebesar Rp3.000.000/ha. Sejak kemunculan ekskavator biaya perbaikan tanggul melonjak hingga saat ini mencapai Rp16.800.000/ha; dilengkapi dengan pintu air cor semen yang menghabiskan biaya sebesar Rp6.900.000/petak; ditambah dengan biaya pembelian bibit udang, ikan bandeng, pupuk, dan racun yang mencapai Rp5.666.000/ha.

Modifikasi alat sekaligus peningkatan biaya menyebabkan tata kelola produksi tambak menjadi lebih kompleks. Dari mulai masa pemeliharaan atau setelah panen total, perlu dilakukan pembersihan hama seperti *burungen*[5] dan *biri-biri*[6]; dilanjutkan dengan peracunan untuk mematikan ikan-ikan predator seperti bandeng laki. Setelah itu, pintu air dibuka agar air dapat masuk hingga lebih dari setengah tinggi kolam dan didiamkan atau dinetralkan selama satu minggu. Kemudian, bibit udang akan dimasukkan dan bisa dipanen setelah berumur tiga hingga empat bulan. Pada masa tersebut juga dilakukan pemeliharaan berupa pemberian pupuk, pembersihan rumput lapio dan lumut, penambalan tanggul, hingga penebangan tunas pohon nipah.

Proses pemanenan dilakukan setelah tiga hingga empat bulan. Terdapat dua bentuk proses panen yaitu *juluk malam* dan *mappeti'*. *Juluk malam* dilakukan setiap pekan pada *nyorong* ke lima hingga tujuh. Kegiatan tersebut dilakukan mulai pukul 19.30 WITA saat surut dan berakhir hingga pukul 23.00. Keesokan harinya, udang yang dipanen akan dipisahkan antara kepala dan badannya. Kemudian, hasil panen akan dijual ke pos udang milik salah satu *penyambang*. Sementara itu, *mappeati'* biasanya dilakukan selama enam bulan atau setengah tahun sekali. Panen tersebut dilakukan dengan menguras habis isi tambak berupa udang maupun ikan bandeng. Kegiatan tersebut dilakukan dari pagi hingga siang hari dengan dibantu oleh para tetangga.

Kegiatan produksi tambak dipengaruhi oleh struktur kelas dan relasi yang terjalin antar aktor. Struktur sosial dalam kegiatan produksi tambak terdiri atas buruh atau penjaga *empang*, petani, dan *penyambang*. Penjaga *empang* menjalin relasi dengan para petani besar. Pemilik tambak sebagai nakhoda sementara penjaga empang sebagai awak kapal. Pemilik tambak berperan menentukan biaya produksi meliputi pembelian bibit udang, bibit bandeng, pupuk, racun, perbaikan tanggul dan pintu air. Pemeliharaan

5 *burungen* adalah salah satu hama yang berbentuk seperti keong dengan panjang mencapai 10 cm dan lebar 5cm

6 *biri-biri* adalah salah satu hama yang berbentuk seperti keong kecil dengan panjang maksimal 3 cm dan lebar 2 cm

hingga pemanenan menjadi tanggung jawab penjaga empang. Model pembagian hasil yang biasanya diterapkan adalah 1/3, 1/4 , dan 1/5 Misalnya, pembagian 1/3 memiliki arti bahwa penjaga *empang* akan mendapatkan jatah dari hasil total dibagi tiga. Sistem bagi hasil didasarkan atas kesepakatan antara pemilik dan penjaga *empang*. Sedangkan, *penyambang* adalah sebutan lokal kepada seseorang pedagang perantara yang memberi modal operasional atau berupa uang maupun bibit udang kepada petani dengan syarat menjual hasil panen kepadanya dan membayar angsuran.

Ketimpangan Nasib dan Mekanisme Akumulasi Petani Besar

Ketimpangan Nasib Penghasilan: Potret Kesenjangan ketika Masa Panen

Setiap masa panen antar-aktor memiliki penghasilan dan mekanisme yang berbeda. Aktor tersebut terbagi atas struktur sosial yaitu buruh, petani, dan *penyambang*. Klasifikasi petani didasarkan atas pandangan emik yang menyatakan klasifikasi luas lahan yaitu kecil (<5 ha), menengah (≥5≤10 ha), dan besar (>10 ha). Mereka memiliki akumulasi keuntungan berbeda berdasarkan besaran hasil yang didapatkan ketika panen. Hal tersebut dipengaruhi oleh kekuatan produksi yang telah dijabarkan sebelumnya. Perbedaan tersebut muncul melalui ketidakmerataan distribusi pendapatan atau ketimpangan penghasilan. Buruh atau penjaga *empang* mendapatkan upah Rp250.000/satu periode *juluk malam* sehingga dalam satu tahun akan mengantongi uang sejumlah Rp12.000.000. Kemudian, petani kecil yang hanya mengandalkan *juluk malam* mengantongi pendapatan kotor sejumlah Rp24.000.000/tahun. Petani menengah yang juga hanya mengandalkan *juluk malam* mampu menghasilkan pendapatan berkisar Rp30.000.000-Rp40.000.000,00/tahun. Sementara itu, petani besar mampu menghasilkan keuntungan hingga Rp962.000.000,00/tahun. Mereka tidak hanya mengandalkan panen parsial, tetapi juga panen total dan beberapa mekanisme akumulasi keuntungan.

Nasib Petani kecil Penggunaan Teknologi Sederhana dan Terlilit Utang Berujung pada Kerugian

> "...Kalau dulu memang orang bilang kerja tambak itu 'berkarat kukunya, tebal dompetnya'...tapi sekarang 'tetap berkarat kukunya, tipis dompetnya'..." ucap Pak Ucok.

Ungkapan di atas merepresentasikan format kehidupan petani kecil di Desa Dere'. Mereka mengalami kontradiksi paling tajam dalam usaha memproduksi diri sebagai tenaga kerja sekaligus kapital. Terlebih, kondisi lingkungan dan harga udang yang tidak stabil ikut andil dalam mempengaruhi ketahanan produktivitasnya. Mereka seringkali menghadapi keterbatasan modal yang signifikan dalam produksi tambak. Rendahnya tingkat perkembangan tenaga kerja produktif menandakan bahwa rumah tangga tersebut sangat rentan terhadap kegagalan dalam satu unsur produksi materialnya. Biaya produksi melebihi hasil panen menyebabkan rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi sebagian biaya yang dikeluarkan untuk input pertanian berikutnya sehingga memilih berutang (Akram-Lodhi 2005). Oleh karena itu, mereka hidup dalam jaring-jaring kewajiban melunasi

pinjaman dan rawan mengalami kerugian. Pilihan untuk menjual *empang* sangat sulit untuk ditempuh karena orang jarang ingin membeli *empang* jebol yang perlu biaya besar untuk perbaikan. Kalaupun mereka yang masih memiliki tambak aktif sangat mungkin tersingkir dari pertanian atau bila mereka bisa mendapatkan kredit, mereka pasti terbebani utang yang berat dan terperosok ke dalam pertanian marginal (Bernstein 2019).

Kawasan karst rentan kekeringan dan kesulitan air. Alternatif penggunaan sumur bor sulit dilakukan mengingat karakteristik sistem akuifer karst susah ditebak (Karunia 2012). Kondisi tanah karst membuat tidak ada keluarga di Wintaos yang punya sumur. Pada tahun 1987-an sebelum ada tampungan air dari semen yang dibangun di tiap rumah, para penduduk mengambil air dari Telaga Jurang Jero untuk memenuhi kebutuhan minum, mandi dan mencuci. Setelah memiliki tampungan air dari semen, setiap musim hujan tiap rumah menampung air hujan dan saat musim kemarau, mereka membeli air dari mobil bertangki air. Sekitar 2013, layanan air PDAM sudah dapat diakses oleh warga Wintaos.

> "...punya tambak sejak 2001 dikasih sama mertua luasnya empat ha, awalnya 2001-2012 biaya sendiri hasilnya lumayan, apalagi 2001-2005 ibaratnya kita lempar udang sama *kentongnya* aja udah bisa tumbuh, cuman setelah itu biasanya kita dua bulan sudah bisa panen pas itu minimal tiga sampai empat bulan, punya saya juga dulu palingan dua malam aja *juluknya*, namanya juga tambak kecil, lain tambak besar yang bisa panen tiga sampai empat malam dan panen total juga. Setelah tahun 2012 karena dananya kurang dan melihat kondisi air sekarang tidak bisa ditoleransi lagi, jadi satu-satunya jalan kalau masih berproduksi ya utang, dibantu sama orang ini untuk ekskavator ... kita sewa ekskavator kurang lebih 4 ha dan ada jebolnya 10,5 m berarti, 15 juta digali keliling pada saat itu tanggulnya rendah dan direhab total 80 jutaan … 15 juta minim untuk pintu air ... di kerja sendiri semampunya ... tambak saya kan dibiayai sama Wawan itu utang saya hampir 80 jutaan sampai sekarang belum pernah dibayar … apalagi kebanyakan udang sudah berpenyakit macam, jadi susah juga mengatakan begini-begini, makanya dua tahun lalu *empang* saya tidak aktif ... jadi sekarang saya beralih nelayan rengek cari ikan, udang, dan lobster … kalau *trawl* cuman udang white..." (Wawancara H. Mehri, 20 November 2023).

> "...selama ini pakai bibit alam aja, itu bapaknya bikin pakai rumpon ada di belakang rumah ... paling juga bisa isi ndak sampai 50.000 ... kalau pintu air itu dari dulu belum pernah diganti, sudah pada keropos juga ... dibantu gali pakai eskavator sama Amin dulu ada kalo 10 tahun lalu, ada Rp50.000.000,00 kemarin itu dibantu ... masih dibayar separuh ... angsurannya bebas kapan aja, hasil *empang*-nya ga seperti dulu ... kita ga ada uang ... *juluk*-nya satu bulan sekali ... suami saya ada punya kapal untuk cari udang papai, kalau *empang* aja nggak cukup ... harus cari sampingan ... sekarang apa-apa mahal, apalagi ini saya masih membiayai cucuku itu Riko" (Wawancara Bu Din, 11 November 2023).

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa para petani kecil mengalami stagnasi atau bahkan merugi. Kautsky dan Lenin (dalam Bernstein 1977) berpendapat bahwa untuk dapat menghadapi buruknya nilai tukar, mereka akan mengurangi standar konsumsinya. Di lahan yang terbatas, mereka menggunakan teknologi sangat sederhana dan tradisional dengan mengeluarkan biaya operasional yang lebih rendah. Hal tersebut terlihat dari penggunaan bibit alam, pintu *empang* dari kayu, dan tidak menggunakan pupuk mutiara.

Oleh karena itu, bagi sebagian besar petani kecil "komersialisasi paksaan dan komodifikasi subsisten yang meluas" tidak menghasilkan peningkatan hasil produktivitas secara besar besaran (Bernstein 2019). Keadaan tersebut semakin memperlemah posisi mereka. Pada akhirnya, untuk menyambung hidupnya mereka melakukan diversifikasi pekerjaan dengan beralih atau bekerja sampingan di luar produksi tambak. Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya mampu mengeluarkan mereka dari keterbatasan ekonomi.

Hingga saat penelitian ini dilakukan, 95% keluarga di Wintaos masih bertani di lahan kering. Paling tidak, tiap keluarga memiliki luas lahan sekitar 0,5 ha. Meskipun hidup di kawasan karst dengan kondisi air terbatas, Mbah Sis dan Mbah Marto (para sesepuh di Wintaos) menuturkan jika sejak perintisan Dusun Wintaos yang diperkirakan terjadi sekitar abad 19, para pembabat alas (perintis dusun) telah menjalankan praktik pertanian untuk mencukupkan kebutuhan pangan mereka. Secara umum, para perintis dan generasi setelahnya mengembangkan praktek pertanian dan produksi pangan yang mengadaptasi kondisi karst di Wintaos dan sekitarnya.

Nasib Petani Menengah : Stagnasi Produksi

> "...Selama tujuh tahun tidak pernah dapat 100 kg ... zaman Gus Dur bisa sampai 270 kg selama empat bulan ... kalau sekarang takut juga pinjam orang ... sampai lima kali sehari menyelam di lumpur ... tidak bisa harap lebih, istilahnya itu sama aja kaya gali lubang tutup lubang...rugi tenaga, rugi biaya... (Wawancara Pak Res, 12 Juli 2023)

Ungkapan "gali lubang, tutup lubang," membingkai potret kehidupan petani menengah. Kelas menengah menduduki posisi rentan menghadapi "guncangan" kemarau panjang, banjir, dan memburuknya nilai tukar antara apa yang harus dibeli dan apa yang bisa mereka jual–keadaan "impitan reproduksi sederhana" (Bernstein 2019). Mereka bisa menjual sebagian besar hasil produksinya, tetapi tidak cukup untuk mendukung penghidupan mereka (Habibi 2021). Tidak adanya "sertifikasi" legal kepemilikan tanah menjadi menghambat penetrasi lembaga kredit formal (Harriss-White dkk. 2009). Pilihan yang tersedia untuk mereka adalah "utang" kepada petani besar. Mereka tidak berdaya dalam bersaing teknologi dengan kelas atas. Sementara itu, pemakaian alat-alat produksi mahal (benih, peralatan, pupuk, insektisida, dan pestisida) tidak menjamin bahwa akan ada peningkatan keuntungan yang sebanding dengan pengeluaran (Bernstein 1979). Hal tersebut terlihat dari ketidakmampuan untuk mendapatkan laba melalui *mappeti.* Mereka memilih untuk tidak melakukan panen total udang maupun ikan bandeng dikarenakan keharusan pengeringan tambak yang berisiko menyebabkan tanggul jebol dan memerlukan biaya besar untuk perbaikan. Selain itu, mereka memilih memasukkan bibit dengan jumlah yang lebih sedikit.

> "… *empang*-nya diisi 50.000 dulu dibantu sama Amin, satu bibitnya Rp 20.000 … ga berani aku isi banyak-banyak, takut rugi ... aku lama sudah ga pernah panen total, paling *juluk malam* aja dua sampai tiga hari ... takut itu nah ga kuat tanggul sama pintunya ..." (Wawancara H.Saqi , 11 November 2023)

Mereka dihadapkan akan potensi kegagalan produksi yang disebabkan oleh gangguan iklim, mengakibatkan perlunya penjualan tanah dalam kondisi darurat untuk melunasi

utang yang terakumulasi (Akram-Lodhi 2005). Pada tahun 2015, H. Saqi mengalami penurunan hasil tambak dan terpaksa menjual tambak berukuran lima ha dengan harga Rp 95.000.000 kepada saudaranya, Fitri. Akibatnya, saat ini H.Saqi hanya memiliki tambak seluas lima ha di depan rumah. Penjualan tersebut tidak dilandasi atas surat perjanjian secara tertulis. Hal yang sama dialami oleh Kohar yang lebih memilih menjual sebagian lahan tambaknya karena kesulitan mengatasi hama dan penyakit udang. Penjualan tersebut digunakan untuk modal membeli lahan sawit sejak sembilan tahun lalu.

Oleh karena itu, biasanya usaha tani skala menengah akan mengurangi waktu senggang dan bekerja lebih lama dan keras (Griffin dkk. 2002). Hal tersebut dilakukan dengan mengandalkan kombinasi beberapa aktivitas di luar pertanian. H. Saqi mencari pekerjaan sampingan yaitu berjualan pakaian dan sandal di pasar setiap satu minggu sekali. Sedangkan, Kohar bekerja sampingan menjadi petani sawit dan anak buah Pak Amin. Ketika diversifikasi di luar sektor pertanian, peralihan jenis pekerjaan ke bentuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan rendah dan bersifat bertahan hidup hanya akan melanggengkan kemiskinan dan eksploitasi (Razavi 2009). Diversifikasi kegiatan mata pencaharian pada skala pasar tenaga kerja yang lebih tinggi juga tidak akan menjadi jalan keluar (Bosma dkk. 2012). Pada akhirnya, upaya petani menengah mempertahankan reproduksi tambaknya berujung pada stagnasi untuk memenuhi kebutuhan subsisten – tidak untuk akumulasi.

Nasib Petani Besar: (Semakin) Tebal Dompetnya

Akumulasi keuntungan petani besar dilakukan untuk melanggengkan posisinya. Keberhasilan akumulasi mereka akan menekan, memperparah, dan memperluas kesenjangan yang dihasilkan siklus tersebut (Li 2014). Salah satunya dibentuk melalui pewarisan, yaitu cara yang paling umum dalam rumah tangga petani untuk memperoleh tanah dan biasanya diberikan setelah orang tua meninggal (Ambarwati dkk. 2016). Kesuksesan Pang Burhan dan H. Toha tidak terlepas dari campur tangan orang tuanya (H. Daeng Munawir') yang telah menjadi *penyambang* terlebih dahulu. Selain mendapatkan warisan berupa tambak, H.Toha dibantu untuk mendaftarkan pos udangnya ke perusahaan Cendana, sedangkan Pang Burhan diberikan pos udang. Usaha mereka saat ini juga dipayungi oleh perusahaan ekspor udang PT. Syam Surya Mandiri milik H. Mangkanang. Selain itu, mereka meminjam uang kepada bank untuk membeli ekskavator dengan menggadaikan aset seperti tanah dan rumah yang berada di kota.

Para petani besar juga melakukan diversifikasi bisnis non pertanian sebagai mekanisme mengurangi risiko gulung tikar. Diversifikasi bisnis petani besar bukanlah suatu paksaan bagi mereka, tetapi sebagai respons terhadap proses mendasar yang telah mengubah aset produktif rumah tangga baik berupa tanah maupun non tanah (Akram-Lodhi 2005). Mereka tidak hanya melakukan monopoli atas perdagangan sebagai sumber kekayaan tetapi juga mendiversifikasi kegiatan nonpertanian (Ambarwati dkk. 2016). Mereka memiliki sumber perputaran modal lain yaitu bisnis penyewaan mes perusahaan. Bisnis tersebut mampu mendatangkan keuntungan hingga Rp20.000.000/bulan. Ditambah lagi, penduduk yang mempunyai lahan luas mampu mengumpulkan dan mendiversifikasi pendapatannya kemudian mendominasi setiap bidang kehidupan desa (Peluso dan Lund 2011; Sidik dan Habibi 2024). Mereka bisa meraup keuntungan sebagai pencari suara atau

bursa politik para caleg DPRD. Para pedagang perantara biasanya akan menjadi perantara penyaluran bantuan berupa bibit udang atau mesin dompeng. Hal tersebut dipilih oleh para caleg DPRD karena pedagang perantara atau *penyambang* memiliki banyak anggota sehingga menjadi jalan untuk mendapatkan suara. Kekuatan mereka juga mampu menjadikan mereka sebagai mitra pelaksana proyek program CSR. Mandat proyek tersebut diberikan oleh Pertamina Hulu Mahakam seperti pembangunan jembatan. Diversifikasi bisnis tersebut menghasilkan pendapatan tinggi yang digunakan untuk mendukung usaha tani yaitu membeli tanah (Bernstein 2019; Ambarwati dkk. 2016).

Taktik-taktik: Akumulasi

Pinjaman: Ikatan Laten

Pada tahun 1970, H. Daeng Munawir' mulai membuka pemukiman Muara Jerang dengan bekerja sebagai nelayan *trawl* dan membuka pos udang. Peralatan penangkapan udang memerlukan biaya operasi yang tinggi. Oleh karena itu, terdapat penyedia modal sekaligus penampung dan penyalur produksi hasil tangkapan para nelayan (Masyhuri 1996). Mereka menciptakan personalisasi informal dan sangat responsif terhadap ketergantungan dalam mekanisme tata kelola baru organisasi perikanan dengan maksud untuk mendatangkan nelayan lainnya (Semedi dan Schneider 2021). H. Daeng Munawir' memanfaatkan peluang dengan memberikan modal berupa mesin kepada para nelayan udang dengan syarat menjual hasil tangkapan dan membayar angsuran. Ketika itu hanya beliau yang memiliki pos udang sehingga mendapatkan kepercayaan dan suntikan modal dari perusahaan ekspor Cendana untuk mengembangkan bisnisnya.

Kedudukan H. Daeng Munawir' sebagai salah satu tokoh tetua dan pemegang otoritas wilayah Muara Jerang digunakan sebagai pintu untuk memikat petani menjadi pemasok udang. Beliau memegang kekuasaan di wilayah tersebut sekaligus mengklaim kepemilikan lahan. Privatisasi kepemilikan lahan menjadi jalan terbuka untuk akumulasi lahan (Semedi 2022). Pergerakan tersebut mulai berlangsung pada periode pelarangan *trawl*, beliau menerima bantuan dari perusahaan ekspor udang Cendana berupa "surat keamanan" untuk melindunginya dari gangguan tentara yang melakukan penertiban. Namun, penurunan hasil tangkapan udang akibat larangan penggunaan *trawl* dan munculnya tambak mendorongnya mengalihkan investasi kepada petani tambak. Sejak saat itu, beliau membebaskan siapa saja untuk membuka tambak di Muara Jerang dengan syarat menjual hasil panen kepadanya. Lahan diberikan bebas dengan ukuran sesuai kekuatan orang tersebut dalam membuka tambak. Pada prinsipnya, beliau ingin membantu siapa saja asalkan ingin "merapat" bersama. Orang-orang tersebut adalah para pendatang gelombang kedua yaitu periode 1990 hingga 2000 dan sebagian besar memiliki hubungan saudara jauh dengan H. Daeng Munawir'.

> "... pindah ke sini tahun 1992 ... dulu dimodali orang terus kita yang kelola, bekas tambak juga (rusak) terus saya yang perbaiki. Dulu saya jualan baju di Samarinda, awal-awalnya di sini banyak keluarga juga terus dipanggil ke sini sama om (H. Daeng Munawir') sebelumnya memang sering ke sini kalau ada acara keluarga, jadi sudah tahu kalau di sini juga banyak orang Bugis" (Wawancara Daeng Sahran, 8 Juli 2023).

Pedagang perantara tidak hanya mempertahankan usahanya, tetapi juga akan

mengembangkan dengan berbagai cara. Mereka melakukan pemungutan biaya renten yang dalam wacana sehari-hari dihaluskan dengan istilah "bantuan atau sumbangan" (Li dan Semedi 2022). Pemberian "pinjaman" berdalih "bantuan" kepada anggota dengan syarat yaitu biaya renten dan menjadi pemasok di pos udangnya. Biaya renten merujuk pelunasan utang berupa uang. Kebebasan membayar angsuran yang "tidak terikat sistem waktu" dan tidak ada "bunga", hanya sebagai topeng "ikatan laten". Pinjaman yang diberikan akan terus mengikat hingga dalam jangka waktu yang lama hingga bertahun-tahun. Surplus tidak lagi diekstraksi dari petani melalui pajak atau bea tradisional, tetapi melalui sewa tetap (Habibi 2021). Modal petani besar sangat eksploitatif, merampas nilai lebih melalui bunga tersembunyi yang dibebankan sebagai pengurangan harga (Athreya dkk.1987). Relasi tersebut menguntungkan para petani besar sekaligus membuat orang miskin menjadi semakin miskin (Timmer 2010)

> "... masih ada sedikit utangnya, soalnya dia ga mau dilunasi ... kalo dilunasi ga bisa ambil udang lagi sama kita kan? … soalnya dari dulu (puluhan tahun) memang mertuaku di situ (Pak Amin) ... katanya dipakai aja dulu uangnya untuk kebutuhan yang lain, terus kemarin tahun 2022 saya minta bantuan H. Toha untuk sewa bego, soalnya Amin ga punya bego ... ada kalo Rp7.000.000, itu belum pernah saya bayar karena belum ada hasil lebih ... paling kalau diangsur berkisar Rp500.000 sampai Rp1.000.000 sekali panen, tapi sekarang kan hasilnya sedikit ... paling sekali panen Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000 kalau dulu lebih Rp 5.000.000 (dua sampai tiga hari) (Wawancara H.Saqi, 11 November 2021).

Manipulasi penjualan dan monopoli hasil panen

Hubungan saling ketergantungan dimanfaatkan oleh petani besar untuk melakukan manipulasi penjualan. Para petani hanya bisa menggantungkan penjualan dan membeli bibit udang kepada pedagang perantara. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan ekspor udang tiger yaitu PT. Syam Surya Mandiri yang terletak jauh di Sungai Meriam. Untuk dapat menjangkau tempat tersebut diperlukan jarak tempuh lebih dari satu jam dengan menggunakan transportasi air yang melintasi aliran sungai Mahakam sehingga memerlukan biaya cukup mahal. Total biaya dalam satu pengiriman bisa mencapai sekitar Rp2.000.000 digunakan untuk membeli solar dan es balok. Oleh karena itu, setelah panen mereka memilih untuk menjualnya ke *penyambang*. Hal tersebut menjadi peluang untuk memonopoli penjualan dengan menurunkan standard size udang dan menjual bibit udang lebih mahal kepada petani. Bibit udang dijual dengan selisih 15 rupiah/ekor dari harga beli di penyedia bibit (Sungai Meriam). Kemudian, *size* udang memiliki berbagai jenis, contohnya *size* terbesar yaitu 20 yang dalam satu kilogram berisi 20 ekor udang. Udang tersebut memiliki panjang lebih dari 15 cm dan lebar 5 cm serta berat yaitu 50 gram/ekor dengan harga Rp170.000/kg. Sedangkan *size* 25 memiliki panjang 10-12 cm dan lebar 4 cm serta berat 10 gram/ekor dengan harga Rp158.000/kg. Manipulasi size dilakukan dengan cara memasukkan udang ukuran "seharusnya *size* 20" ke dalam "*size* 25".

Penurunan tersebut akan berimbas pada menurunnya penerimaan hasil jual udang dan secara sadar diketahui oleh para petani. Mereka tidak melakukan tawar menawar yang panjang, meskipun harga yang diberikan seringkali murah dengan alasan kualitas panen rendah dan juga permasalahan kenaikan biaya kendaraan. Akhirnya, *bargaining position*

mereka lemah dan hanya bisa menerima berapa saja hasilnya (Mahmudah dan Harianto 2014).

> "... (berapa selisih harga jualnya?) mungkin *size*-nya, seharusnya 20 tapi kalau di sini dilarikan ke 30...harga seharusnya 170 ribu tapi disini cuman 105 (Pak Haji tahu kalau itu diturunin *size*-nya?) ... tahu tapi diem aja, begitu memang kan itungannya bos? (Wawancara H. Bari, 7 Desember 2023).

Eksploitasi tenaga kerja digerakkan oleh kebutuhan untuk memperluas skala produksi dan meningkatkan produktivitas demi menciptakan laba (Bernstein 2019). *Penyambang* mengambil keuntungan dengan cara menjual lebih mahal bibit udang kepada petani dengan selisih harga 15 rupiah per bibit. Selain itu, petani besar mengambil alih semua hasil panen ikan bandeng untuk mendapatkan keuntungan. *Ma'ppetti* ikan bandeng dilakukan setiap satu tahun sekali dan tidak membagi hasil dengan penjaga *empang* yang telah merawat tambak tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa petani besar memiliki kontrol kuasa dalam menentukan pembagian hasil.

Pada akhirnya, kesenjangan sosial yang muncul secara simbolik maupun harfiah terbangun melalui ketidakmerataan distribusi kemakmuran yang dikonstruksi oleh kontrol kuasa petani besar. Kontrol kuasa terbentuk dari ketergantungan antara modal dan tenaga kerja yang dimanfaatkan untuk akumulasi keuntungan. Akumulasi keuntungan tersebut digerakkan melalui mekanisme pinjaman, manipulasi penjualan, dan monopoli hasil panen. Selain itu, mereka memiliki sumber perputaran modal dari perusahaan ekspor atau bank, bursa politik, pelaksana proyek, dan penyewaan mes perusahaan. Bingkai kesenjangan modal berpengaruh terhadap perbedaan penggunaan alat produksi. Di samping itu, risiko-risiko ekologis dan tren penurunan harga ikut mempengaruhi ketahanan petani kecil, menengah, dan besar. Petani kecil menggunakan alat produksi sederhana seperti bibit udang alam, pintu air dari kayu, dan tidak menggunakan pupuk mutiara. Petani menengah memilih untuk tidak melakukan panen total udang maupun ikan bandeng. Petani besar mampu melakukan optimalisasi produktivitas dengan penggunaan pupuk lengkap (pupuk urea, kapur, dan pupuk mutiara) dan pintu air yang terbuat dari semen cor. Impitan reproduksi sederhana memperlihatkan bahwa petani kecil dan menengah lebih berpotensi mengalami kerugian. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menjual tambak atau beralih ke sektor luar tambak seperti nelayan *rengge*' (ikan), udang papai (rebon) dan kerang *tudai* demi menyambung hidupnya. Namun, hal tersebut hanya sebagai alternatif subsisten, tidak menjadi jalan keluar untuk melakukan akumulasi kekayaan–seperti petani besar.

Kesimpulan

Konversi lahan mangrove menjadi tambak di Desa Dere' menciptakan ketimpangan penguasaan lahan yang cukup signifikan. Ekspansi lahan tidak dapat dilakukan oleh semua petani, meskipun secara umum klaim atas lahan dapat dilakukan dengan mudah, harga lahan relatif murah, dan tanpa adanya penggunaan pakan udang yang mahal. Permasalahan tersebut terjawab melalui format ketimpangan nasib yang terbangun dari ketidakmerataan distribusi kemakmuran atas kontrol kuasa petani besar. Kontrol kuasa terbentuk dari ketergantungan antara modal dan tenaga kerja yang dimanfaatkan untuk

akumulasi keuntungan. Relasi ketergantungan terbangun atas keterbatasan modal dan alat-alat produksi para petani kecil dan menengah yang menjadikan mereka hanya bergantung kepada petani besar. Ketergantungan tersebut dimanfaatkan untuk akumulasi keuntungan melalui mekanisme pinjaman sebagai ikatan laten, manipulasi penjualan, dan monopoli hasil panen. Selain itu, petani besar memiliki sumber perputaran modal dari perusahaan ekspor atau bank, pelaksana proyek, bursa politik, dan penyewaan mess perusahaan (Pertamina Hulu Mahakam). Sedangkan, himpitan reproduksi sederhana akibat risiko ekologis dan penurunan harga udang memperlihatkan bahwa nasib petani kecil dan menengah lebih berpotensi mengalami kerugian. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menjual tambak, beralih atau mencari sampingan pekerjaan di sektor luar tambak seperti nelayan rengge', udang papai, dan tudai demi menyambung hidupnya yang hanya sebagai alternatif subsisten –tidak menjadi jalan keluar untuk melakukan akumulasi kekayaan seperti petani besar.

Ucapan Terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Henry Luce Foundation atas dukungan pendanaan secara parsial. Selain itu, juga kepada Prof. Dr Ahmad Maryudi, Dr. Micah Fisher, Dr. Dwi Laraswati, dan M. Haidar Daulay, M.Sc yang telah memberikan kesempatan untuk tergabung dalam *project* ini.

Penulis juga menghargai masukan dan saran–*amal jariyah* yang diberikan oleh Prof. Pujo Semedi Hargo Yuwono dalam penyusunan artikel ini. Tidak lupa, apresiasi mendalam disampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang berkontribusi dalam diskusi serta memberikan masukan yang konstruktif.

Pendanaan

Penelitian ini didanai secara parsial oleh Henry Luce Foundation dan bagian dari project "Vulnerables Deltas in Southeast Asia: Climate Change, Water Pollution, and Socio-Economic Transformation" yang diinisasi oleh East West Center. *Project* ini berkolaborasi dengan Wilson Center's China Environment Forum, Chulalongkorn University, Srinakharinwirot University, Khon Kaen University, Sebijak Institute Fakultas Kehutanan UGM, An Giang University, Asian Vision Institute, CE-HERO Universitas Mulawarman, dan FSRG Universitas Hasanuddin.

Referensi

Akram-Lodhi, A. Haroon. 2005. "Vietnam's Agriculture: Processes of Rich Peasant Accumulation and Mechanisms of Social Differentiation." *Journal of Agrarian Change* 5 (1): 73–116. https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2005.00095.x.

Ambarwati, Aprilia, Ricky Ardian Harahap, Isono Sadoko, and Ben White. 2016. "12 Land Tenure and Agrarian Structure in Regions of Small-Scale Food Production." In *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty,* 265-287. https://doi.org/10.1355/9789814762106-017.

Athreya, Venkatesh, Gustav Böklin, Göran Djurfeldt, and Staffan Lindberg. 1987.

"Identification of Agrarian Classes: A Methodological Essay with Empirical Material from South India." *The Journal of Peasant Studies* 14 (2): 147-190. https://doi.org/10.1080/03066158708438326.

Bernstein, Henry. 1977. "Notes on Capital and Peasantry." *Review of African Political Economy* 4 (10): 60-73. https://doi.org/10.1080/03056247708703339.

———. 1979. "African Peasantries: A Theoretical Framework." *The Journal of Peasant Studies* 6 (4): 421-443. https://doi.org/10.1080/03066157908438084.

———. 2019. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*. Yogyakarta: INSISTPress.

Bosma, Roel, Ahmad Syafei Sidik, Paul van Zwieten, Anugrah Aditya, and Leontine Visser. 2012. "Challenges of a Transition to a Sustainably Managed Shrimp Culture Agro-Ecosystem in the Mahakam Delta, East Kalimantan, Indonesia." *Wetlands Ecology and Management* 20: 89–99. https://doi.org/10.1007/s11273-011-9244-0.

Bourgeois, dkk. 2002. *A Socio Economic and Institutional Analysis of Mahakam Delta Stakeholders*. CIRAD.

Bunting, Stuart W., Roel H. Bosma, Paul A.M. van Zwieten, and A. S. Sidik. 2013. "Bioeconomic Modeling of Shrimp Aquaculture Strategies for the Mahakam Delta, Indonesia." *Aquaculture Economics & Management* 17 (1): 51-70. https://doi.org/10.1080/13657305.2013.747226.

Griffin, Keith, Azizur Rahman Khan, and Amy Ickowitz. 2002. "Poverty and the Distribution of Land." *Journal of Agrarian Change* 2 (3): 279-330. https://doi.org/10.1111/1471-0366.00036.

Habibi, Muchtar. 2021. "Masters of the Countryside and Their Enemies: Class Dynamics of Agrarian Change in Rural Java." *Journal of Agrarian Change* 21 (4): 720-746. https://doi.org/10.1111/joac.12433.

Hall, Derek. 2011. "Land Grabs, Land Control, and Southeast Asian Crop Booms." *Journal of Peasant Studies* 38 (4): 837-857. https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607706.

Harriss-White, Barbara, Deepak K. Mishra, and Vandana Upadhyay. 2009. "Institutional Diversity and Capitalist Transition: The Political Economy of Agrarian Change in Arunachal Pradesh, India." *Journal of Agrarian Change* 9 (4): 512-547. https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2009.00230.x.

Hutami, Mohamad Fitriady Helfian, Syahruni Ahmad, Ridwan, Mamduh Fikri, Yuyun Kurniawan, Ellyn K. Damayanti, and Muhammad Ridwansyah. 2020. "Peluang dan Strategi Pengurangan Emisi di Kawasan Delta Mahakam, Kalimantan Timur." *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 9 (3): 181-192. https://doi.org/10.22437/jels.v9i3.12331.

KKN 45 Universitas Mulawarman 2019 dan Pemerintah Desa Tani Baru. 2019. Buku Profil Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kusumawati, Rini, Simon R.Bush, and Leontine E. Visser. 2013. "Can Patrons Be Bypassed? Frictions Between Local and Global Regulatory Networks Over Shrimp Aquaculture in East Kalimantan." *Society & Natural Resources* 26 (8): 898-911. https://doi.org/10.1080/08941920.2012.723305.

Lenggono, P. Setia, Arya H. Dharmawan, Endriatmo Soetarto, and Didin S. Damanhuri. 2012. "Kebangkitan Ekonomi Lokal: Kemunculan Ponggawa Pertambakan dan Fenomena Industri Pengolahan Udang Ekspor di Delta Mahakam." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6 (2): 132–144.

Lenggono, P. Setia. 2015. *Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang*. Yogyakarta: STPN Press.

Li, Tania Murray. 2014. *Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*. Translated by S. N. Kartikasari dan Sumitro. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Li, Tania Murray, dan Pujo Semedi. 2022. *Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit*. Banten: Marjin Kiri.

Luo, Juhua, Zhe Sun, Lirong Lu, Zhuyang Xiong, Lipeng Cui, and Zhigang Mao. 2022. "Rapid Expansion of Coastal Aquaculture Ponds in Southeast Asia: Patterns, Drivers and Impacts." *Journal of Environmental Management* 315: 115100. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115100.

Mahmudah, Erni and Sugeng Harianto. 2014. "*Bargaining Position* Petani dalam Menghadapi Tengkulak." *Paradigma* 2 (1).

Masyhuri. 1996. *Menyisir Pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama dan KITLV.

Mustafa, Akhmad, Rachman Syah, Mudian Paena, Ketut Sugama, Endhay Kusnendar Kontara,Irwan Muliawan, Hidayat Suryanto Suwoyo, Andi Indra Jaya Asaad, Ruzkiah Asaf, Erna Ratnawati, Admi Athirah, Makmur, Suwardi, and Imam Taukhid. "Strategy for Developing Whiteleg Shrimp (*Litopenaeus vannamei*) Culture Using Intensive/Super-Intensive Technology in Indonesia." *Sustainability* 15 (3): 1753. https://doi.org/10.3390/su15031753.

Powell, N., & Osbeck, M. (2010). Approaches for understanding and embedding stakeholder realities in mangrove rehabilitation processes in Southeast Asia: Lessons learnt from Mahakam Delta, East Kalimantan. Sustainable Development, 18(5), 260-270.

Peluso, Nancy Lee. 2005. "Seeing Property in Land Use: Local Territorializations in West Kalimantan, Indonesia." *Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography* 105 (1): 1-15. https://doi.org/10.1080/00167223.2005.10649522.

Persoon, Gerard A., and Rikardo Simarmata. 2014. "Undoing 'Marginality': The Islands of the Mahakam Delta, East Kalimantan (Indonesia)." *Journal of Marine and Island Cultures* 3 (2): 43-53. https://doi.org/10.1016/j.imic.2014.11.002.

Razavi, Shahra. 2009. "Engendering the Political Economy of Agrarian Change." *The Journal of Peasant Studies* 36 (1): 197-226. Routledge. https://doi.org/10.1080/03066150902820412.

Santoso, Hery. 2019. *Rajah Merah di Ladang Kentang*. Yogyakarta: Interlude.

Semedi, Pujo. 2013. "Coast Line Expansion and Social Dynamics: The Comal Estuary 1850s–2010s." *Journal of Asian Network for GIS-Based Historical Studies* 45: 60.

———. 2022. "Rubber, Oil Palm, and Accumulation in Rural West Kalimantan, 1910s–2010s." *Paramita: Historical Studies Journal* 32 (1). http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v32i1.29470.

Semedi, Pujo, and Katharina Schneider. 2021. "Fishers' Responses to the Danish Seiner Ban and the History of Fisheries Governance on the Java North Coast." *Maritime Studies* 20 (1): 43-62. https://doi.org/10.1007/s40152-020-00202-1.

Sidik, Ahmad. S. 2010. The changes of mangrove ecosystem in Mahakam Delta, Indonesia: A complex socialenvironmental pattern of linkages in resources utilization: Mangrove forest. Borneo Research Journal, 4, 27-46.

Timmer, Jaap. 2010. "Being Seen like the State: Emulations of Legal Culture in Customary

Labor and Land Tenure Arrangements in East Kalimantan, Indonesia." *American Ethnologist* 37 (4): 703-712. https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2010.01279.x.